

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN
TRANSMIGRASI KAB. BOLAANG
MONGONDOW UTARA

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat taufiq dan hidayah Nya, sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024. Dan juga sebagai acuan pelaksanaan kegiatan perencanaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Perubahan Renja sebagai dokumen perencanaan SKPD yang memuat kebijakan program dan kegiatan dalam satu tahun dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu serta perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui renja pula diharapkan dapat memberikan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Demikian, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen renja ini, diucapkan terima kasih.

Boroko, 11 Juli 2024

KEPALA DINAS
KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI



ABDUL MUIS SURATINOYO, S.H., M.H
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.C
NIP. 19710313 199803 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	5
2.1. Evaluasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.....	6
2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ...	7
2.3. Penelaahan Perubahan Usulan Program/Kegiatan Perangkat Daerah Menggambarkan Analisis Perlunya Dilakukan Perubahan / Pergeseran Anggaran Pada Perangkat Daerah..	8
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	9
3.1 Tujuan dan Sasaran	9
3.2 Perubahan Program dan Kegiatan	9
BAB IV. PENUTUP	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik skala nasional maupun daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) dan hasil pengendalian pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenan.

Rencana Kerja Perubahan disusun untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan k tenagakerjaan dan ketransmigrasian, strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra serta pagu indikatif yang dituangkan dalam KUAP-PPAS. Penyusunan Renja Perubahan mengacu pada Renstra guna pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah. Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara saling berkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya yang sifatnya perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu penyusunan Renja Perubahan perlu memperhatikan dan mensinergikan RPJM KL, RPJM Provinsi Sulawesi Utara, Renstra Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja program kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi seperti : permasalahan actual yang berkembang, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai serta proyeksi prioritas belanja maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan. Dari penjelasan diatas maka Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 guna menampung seluruh perubahan yang terjadi yang dikarenakan perubahan asumsi-asumsi tersebut yang berdampak pada struktur APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan kondisi tersebut, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dapat melakukan pergeseran pagu antar kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dalam Perubahan RKPD tahun 2024. Selanjutnya Renja Perubahan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 ini digunakan sebagai pedoman dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2007 tentang Kab. Bolaang Mongondow Utara sebagai daerah Otonom;
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2007 tentang ketrasmigrasian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Keputusan menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Dearah Tahun 2024-2026
12. Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

13. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja adalah :

1. Optimalisasi pencapaian Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah;
2. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan dan subkegiatan;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan KUAP-PPASP

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
- 2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD

- 2.3 Penelaahan Perubahan Usulan Program/Kegiatan Perangkat Daerah Menggambarkan Analisis Perlunya Dilakukan Perubahan / pergeseran Anggaran Pada Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.2 Perubahan Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 mengacu pada Renstra 2024-2026 dan menguraikan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah.

Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya akan dicapai. Salah satu sebab masih rendahnya penyerapan anggaran karena terdapat kegiatan yang pelaksanaannya sementara berjalan dan kegiatan yang lain masih berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pencapaian kinerja Renstra terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja yang dilakukan setiap triwulan penting dilaksanakan guna memaksimalkan tercapainya target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2024. Hasil dari evaluasi tersebut sebagai acuan dalam melakukan perubahan rencana program kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 serta menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan

dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini memuat evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebagai berikut :

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk Tahun Anggaran 2024 mendapatkan alokasi belanja daerah sebesar Rp. 2.844.895.656 Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai Sebesar Rp 1.664.478.686 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 1.155.416.970 dan Belanja Hibah sebesar Rp 25.000.000. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar 39,33% dengan rincian belanja pegawai 62,61%, Belanja Barang dan jasa 6,65% dan Belanja Hibah sebesar 0%. Untuk program prioritas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yaitu program pembangunan kawasan transmigrasi belum dapat direalisasikan karena masih berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal jadwal pelaksanaan kegiatan. Adapun capaian pelaksanaan program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada **tabel 2.1** sebagaimana terlampir.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi terdapat program kegiatan yang sangat penting bagi masyarakat yaitu program /kegiatan pelatihan bagi para pencari kerja yang pada tahun ini pelaksanaan kegiatannya sementara berjalan. Program/kegiatan yang terdapat pada bidang ketenagakerjaan tersebut sangat diminati oleh masyarakat terutama kegiatan pelatihan kerja yang bekerjasama dengan BP2MI dan Training Sertifikasi Operator Alat Berat (SIO). Dan untuk program Hubungan Industrial berupa Hibah kepada SBSI kegiatannya sementara berjalan yaitu persiapan semua dokumen pertanggungjawaban yang diperlukan guna tertib dan taat administrasi.

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD

Isu-isu yang terkait dengan pelaksanaan tugas dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi saat ini adalah :

1. Tingkat kualitas dan produktivitas pencari kerja/ tenaga kerja relatif masih rendah
2. Tingkat pengangguran terbuka masih relatif tinggi
3. Lapangan Kerja yang tersedia masih terbatas
4. Masih banyak ditemui pencari kerja/tenaga kerja hanya memilih pekerjaan pada sektor formal atau menjadi CPNS

2.3 Penelaahan Perubahan Usulan Program/Kegiatan Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kabupaten Bolaang Mongondow Utara sampai Triwulan II dengan realisasi keuangan sebesar 39,33%. Ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang harus dicapai. Hal ini disebabkan masih ada beberapa kegiatan yang dalam proses sementara berjalan. Dan juga ada beberapa kegiatan/sub kegiatan yang tidak dapat direalisasikan hingga akhir tahun sehingga perlu dilakukan perubahan dan dialihkan pada kegiatan/subkegiatan yang masih memerlukan anggaran .

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah “Meningkatnya Pendapatan Masyarakat”.

Sedangkan sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah “Pengurangan Pengangguran”

3.2 Perubahan Program dan Kegiatan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2024 mengacu pada RPD tahun 2024-2026 dan Renstra tahun 2024-2026 hal ini memerlukan fokus dan arah kebijakan pembangunan yang jelas, agar dalam pelaksanaannya dapat leboh terarah, tepat sasaran, efektif, efisien sehingga hasil yang ingin dicapai dapat diwujudkan. Pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 terdapat kegiatan dan subkegiatan yang mengalami perubahan dikarenakan hingga akhir tahun anggaran tersebut tidak dapat direalisasikan sehingga akan dialihkan ke kegiatan/subkegiatan yang masih memerlukan anggaran. Program dan kegiatan yang mengalami perubahan dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagaimana terlampir.

BAB IV P E N U T U P

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja sangat ditentukan oleh beberapa faktor yakni : kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan, dan situasi yang mendukung. Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2024 berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lain yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan pelaksanaan rencana kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan norma aturan yang berlaku.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 sebagai dokumen operasional pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan tahun 2024. Dan guna terlaksananya kegiatan-kegiatan serta terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2024.

Boroko, 11 Juli 2024

KEPALA DINAS
KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI


ABDUL MUIS SURATINOYO, S.H., M.H
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710313 199803 1 010

Tabel. 3.2

REKAPITULASI PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024 MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU APBD 2024	RENCANA PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RENJA 2024	(BERTAMBAH / BERKURANG)	PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		APBD 2024	P-APBD				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7 = (6-5)	8	9	10
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI				2.844.896.656	2.881.909.527	37.013.871			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	2.019.996.306	2.057.010.177	37.013.871			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	1.664.478.696	1.701.492.616	37.013.930		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	16	1.664.478.696	1.701.492.616	37.013.930		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Administrasi Kepegawayaan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawayaan Perangkat Daerah	0	0	-	-	-		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	-	-	-		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	-	-	-		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	117.723.100,00	139.104.700,00	21.381.600		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor Yang Disediakan	3	3	4.117.100	5.696.600	1.579.500		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak/Penggandaan yang Disediakan	3	3	3.861.000	6.373.900	2.512.900		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	28	28	109.745.000,00	127.034.200,00	17.289.200		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	0	0	0	0	-		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	0	-		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU APBD 2024	RENCANA PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RENJA 2024	(BERTAMBAH / BERKURANG)	PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		APBD 2024	P-APBD				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7 = (6-5)	8	9	10
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	0	-		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	-		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	189.064.520,00	167.682.861,00	(21.381.659)		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	3	3.477.500	4.875.000	1.397.500		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	26.357.580	28.357.101	1.999.521		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	159.229.440	134.450.760	(24.778.680)		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	48.730.000	48.730.000	-		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas, Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	12	42.630.000	42.630.000	-		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	-		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Dipelihara	0	0	0	0	-		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	10	10	6.100.000	6.100.000	-		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	0	0	0	0	-			
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rasio kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja	0	0	0	0	-		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0	0	0	0	-		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU APBD 2024	RENCANA PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RENJA 2024	(BERTAMBAH / BERKURANG)	PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		APBD 2024	P-APBD				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7 = (6-5)	8	9	10
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan bersertifikasi	100	100	749.676.050	749.676.050	-			
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan Berbasis Kompetensi	40	40	749.676.050	749.676.050	-		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	98	98	749.676.050	749.676.050	-		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase KK Transmigrasi Yang berhasil mendapatkan sertifikat	0	0	0	0	-			
Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian	Jumlah KK yang di dapatkan pendampingan hukum	0	0	0	0	-		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Penguatan Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Kelambagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan permukiman yang Dikembangkan Dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelambagaan	0	0	0	0	-		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penyelesaian temuan lapangan	60	60	50.223.300	50.223.300	-			
Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten / kota	Persentase temuan lapangan hasil monitoring yang ditindak lanjuti	100	100	50.223.300	50.223.300	-		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Monitoring, dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah lokasi transmigrasi yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	1	1	50.223.300	50.223.300	-		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	61	61	25.000.000	25.000.000	-			
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanaya Beroperasi Dala 1 Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang memiliki data dan Informasi sarana HI	22	22	25.000.000	25.000.000	-		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Penyenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1	1	25.000.000	25.000.000	-		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Didaerah Kabupaten / Kota	Persentase Perkara Perselisihan Yang Terselamatkan	0	0	0	0	-		Penurunan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Tabel. 2.1
CAPAIAN KINERJA SKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA S.D TRIWULAN II TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = (4/3)
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI			RATA-RATA KINERJA	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	2.026	20
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	62,43	62
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	16	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundangan-undangan	0	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	8,00	8,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor Yang Disediakan	3	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak/Penggandaan yang Disediakan	3	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	28	8,00	28,57
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	0	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	-	-
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	-	-
Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	48,15	48,15
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	1,00	1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	6,00	6
Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	6,00	6
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	3,00	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	3,00	0
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Dipelihara	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	10	0	0
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	0	0	0

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA S.D TRIWULAN II TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = (4/3)
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rasio kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja	0	0	0
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0	0	0
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan bersertifikasi	100	0	0
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan Berbasis Kompetensi	40	0	0
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	98	0	0
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase KK Transmigrasi Yang berhasil mendapatkan sertifikat	0	0	0
Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian	Jumlah KK yang di mendapatkan pendampingan hukum	0	0	0
Penguatan Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan permukiman yang Dikembangkan Dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	0	0	0
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penyelesaian temuan lapangan	60	0	0
Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten / kota	Persentase temuan lapangan hasil monitoring yang ditindak lanjuti	100	0	0
Monitoring, dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah lokasi transmigrasi yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	1	0	0
Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	61	0	0
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanaya Beroperasi Dala 1 Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang memiliki data dan Informasi sarana HI	22	0	0
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1	0	0
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Didaerah Kabupaten / Kota	Persentase Perkara Perselisihan Yang terselesaikan	0	0	0
Penyelesaian Perseleisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang bewrdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	0	0	0


 Boro, 11 Juli 2024
 Kepala Dinas
 ABDUL MUIS SURATINOYO, SH., M.H
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 197103131998031010